

Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Moh. Toriq Alfian

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : a.toriq11@gmail.com

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : yasin@untag-sby.ac.id

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
60118

Abstract. *The realization of economic growth and development cannot be separated from the support of the allocation of funds used to make it happen. These expenditures will increase aggregate spending and increase the level of economic activity in the country (Sukirno, 2004). From this aspect, research was carried out using a qualitative descriptive method originating from the BPS City of Surabaya. The results obtained by the regional budget in the city of Surabaya from 2018 – 2020 have fluctuated. In 2019 the regional budget for the City of Surabaya increased by 26.24% while it decreased in the following year by 22.18%. While in 2019 Surabaya City's GRDP increased by 6.08%, but in 2020 it decreased by 4.85% due to Covid-19.*

Keywords: *Economic Growth, Government Spending, GRDP.*

Abstrak. Terwujudnya Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak lepas kaitannya dengan dukungan sumber alokasi dana yang digunakan untuk mewujudkannya. Pembelanjaan - pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2004). Dari aspek tersebut dilakukanlah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari BPS Kota Surabaya. Hasil yang didapat anggaran belanja daerah di Kota Surabaya dari tahun 2018 – 2020 mengalami fluktuatif. Di tahun 2019 anggaran belanja daerah Kota Surabaya naik sebesar 26,24% sedangkan mengalami penurunan di tahun selanjutnya sebesar 22,18%. Sementara di tahun 2019 PDRB Kota Surabaya meningkat sebesar 6.08%, namun di tahun 2020 turun sebesar 4.85% akibat adanya Covid-19.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, PDRB.

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mengacu pada perubahan dan kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output atau pendapatan agregat suatu negara dalam jangka waktu tertentu, sementara perkembangan ekonomi mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti perubahan struktural, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan dalam berbagai indikator sosial.

Terwujudnya Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak lepas kaitannya dengan dukungan sumber alokasi dana yang digunakan untuk mewujudkannya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sumber utama dari penerimaan pemerintah adalah bersumber dari Penerimaan Pajak, yang nantinya digunakan untuk membiayai segala aktivitas pemerintah, baik untuk tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang (Karya, 2017). Pembiayaan yang digunakan untuk belanja pemerintah atau pengeluaran negara merujuk pada total jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsinya. Beberapa bentuk pengeluaran negara meliputi :

1. Belanja modal: mencakup investasi pemerintah dalam infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan instalasi publik lainnya. Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memfasilitasi perdagangan, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
2. Belanja sosial: pengeluaran negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial termasuk dalam kategori belanja sosial. Pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun dan memelihara sekolah, rumah sakit, fasilitas kesehatan masyarakat, serta menyediakan bantuan finansial dan jaminan sosial kepada kelompok rentan dan masyarakat umum.
3. Belanja pertahanan: mencakup pengeluaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah mengalokasikan dana untuk mempertahankan militer, menjaga keamanan dalam negeri, serta mengembangkan dan memperbaiki perlengkapan militer.
4. Subsidi: pemerintah dapat memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi atau membantu masyarakat yang kurang

mampu. Subsidi energi, transportasi, atau bantuan langsung kepada masyarakat adalah beberapa contoh subsidi yang umum.

5. Transfer pembayaran: Pengeluaran negara juga meliputi transfer pembayaran kepada penerima manfaat yang berhak menerima, seperti tunjangan pensiun, tunjangan anak, tunjangan pengangguran, dan bantuan sosial lainnya.

Pengeluaran negara dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara langsung melalui pengeluaran langsung pemerintah dan secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pengeluaran negara yang tidak terkendali dapat menyebabkan defisit anggaran, inflasi, atau beban utang yang berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Kota Surabaya yang memiliki basis ekonomi yang tinggi sangat penting untuk mengelola pengeluaran negara dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk membiayai berbagai program pendukung kegiatan pemerintah. Pembelanjaan - pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2004). Pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, itu dibagi menjadi konsumsi pemerintah, pembayaran transfer, dan pembayaran bunga. Kemudian, dalam klasifikasi yang lain, dan yang utama, itu terbagi menjadi tiga:

1. Pengeluaran saat ini : mewakili pengeluaran rutin untuk kegiatan operasional dan administrasi. Belanja untuk gaji pegawai sipil adalah contohnya. Contoh lainnya adalah barang dan jasa untuk peralatan kantor dan untuk menyediakan layanan publik. Pengeluaran ini bersifat rutin dan dibayar pemerintah secara teratur.
2. Pengeluaran modal : mewakili belanja produktif oleh pemerintah. Kadang, kita menyebutnya sebagai pembentukan modal tetap. Contohnya adalah belanja infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jalur kereta api dan bandara.

3. Pembayaran transfer : pembayaran moneter ke sektor swasta tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa. Contohnya adalah tunjangan pengangguran, hibah beasiswa dan tunjangan jaminan sosial. Karena tidak ada barang dan jasa yang dipertukarkan, itu tidak merepresentasikan pengeluaran untuk produksi. Komponen ini dikecualikan dalam perhitungan PDB di bawah pendekatan pengeluaran.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang didasarkan atau bersumber dari data primer jurnal ilmiah, buku, serta studi literature yang berhubungan dengan topik pembasahan penelitian ini. Sumber data eksternal yang diperoleh dalam penelitian ini, bersumber dari data olahan yang dirilis oleh pihak berwenang yakni Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa data PDRB Kota Surabaya tahun 2018-2020 dan Data pengeluaran pemerintah Kota Surabaya tahun 2018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Pengeluaran Pemerintah Kota Surabaya

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Surabaya Menurut Jenis Belanja Periode 2018 – 2020 (Rupiah)

Jenis Belanja	2018	2019	2020
Belanja Langsung	6,220,468,660,590	7,673,498,079,394	5,609,036,108,599
Belanja Tidak Langsung	1,956,460,837,292	2,648,727,476,619	2,423,644,879,466
Total Belanja Daerah	8,176,929,497,882.0 0	10,322,225,556,013.0 0	8,032,680,988,065.4 7

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa pengeluaran Pemerintah Kota Surabaya dibedakan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kedua jenis belanja tersebut mengalami fluktuatif dengan peningkatan yang terjadi karena seiring bertambahnya tahun, pemerintah butuh dana yang lebih besar guna merealisasikan program dan kegiatannya. Namun, menurun di tahun 2020 dikarenakan Covid-19 yang juga berdampak di Kota Surabaya. Dalam hal ini, belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Desa, dan belanja tak terduga. Yang membedakan adalah jika belanja tidak langsung merupakan belanja yang yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Dilihat dari data tersebut, belanja pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 10.332,22 miliar rupiah yang terdiri dari belanja langsung sebesar 7.673,49 miliar rupiah dan belanja tidak langsung sebesar 2.648,72 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 26,24%.

Sementara untuk tahun 2020, belanja daerah Kota Surabaya mengalami penurunan sebesar 22,18%. Dengan total belanja sebesar 8.032,68 miliar rupiah yang terdiri dari belanja langsung sebesar 5.609,03 miliar rupiah dan belanja tidak langsung sebesar 2.423,64 miliar rupiah.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Periode 2018 – 2020 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	227.807.923,57	239.677.488,50	232.884.885,90
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.549.837,33	2.754.102,49	2.785.821,78
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.532.926,58	14.195.513,03	13.560.813,54
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	107.799.575,77	113.167.943,19	106.676.205,22
Perubahan Inventori	6.677.121,07	6.768.017,56	2.548.844,10
Net Ekspor Barang dan Jasa	28.936.557,75	34.316.241,37	32.479.854,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	387.303.942,07	410.879.306,14	390.936.424,98

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, disajikan data terkait laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya atas dasar harga konstan menurut pengeluaran dari tahun 2018 – 2020. Terlihat di tahun 2019 PDRB Kota Surabaya naik dari tahun sebelumnya menjadi 410.879.306,14 atau naik sebesar 6.08%. Di tahun 2020, Kota Surabaya juga terdampak dengan adanya Covid-19 yang mengakibatkan PDRB turun sebesar 390.936.424,98 atau turun sebesar 4.85%. Penurunan paling drastis terjadi pada sektor perubahan inventori menjadi 2.548.844,10 di tahun 2020.

Melihat data – data yang ada, pengeluaran pemerintah berbanding lurus terhadap laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya. Dilihat di tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki anggaran belanja naik dari tahun sebelumnya diimbangi dengan PDRB Kota Surabaya yang juga naik di tahun 2019. Tetapi keduanya sama – sama menurun di tahun 2020 dikarenakan dampak Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja daerah di Kota Surabaya dari tahun 2018 – 2020 mengalami fluktuatif. Di tahun 2019 anggaran belanja daerah Kota Surabaya naik sebesar 26,24% sedangkan mengalami penurunan di tahun selanjutnya sebesar 22,18%. Di samping itu, dengan adanya peningkatan belanja daerah Kota Surabaya mengakibatkan terjadinya peningkatan pada PDRB Kota Surabaya. Di tahun 2019 PDRB Kota Surabaya meningkat menjadi 410.879.306,14 atau naik sebesar 6.08% sedangkan di tahun selanjutnya turun menjadi 390.936.424,98 atau turun sebesar 4.85%. Di tahun 2020 penurunan terjadi akibat dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menjadi wabah di Kota Surabaya.

DAFTAR REFERENSI

- Rahmawati, Heni. (2022). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI)*: 31(2), 77-82. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.745>.
- Surgawati, Iis. (2020). Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*: 1(1), 25-34.
- Badan Pusat Statistik. (2017–2022). PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Keuangan Daerah Kota Surabaya.